TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Prepared by:

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TOBA



Kesbangpol@tobakab.go.id

Kesbangpol Toba

SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 441 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025

BUPATI TOBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan bahwa penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Toba Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Diktum ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Inspektorat;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Kesehatan;
13. Dinas Pertanian;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
17. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
27. Kecamatan Ajibata;
28. Kecamatan Bonatua Lunasi;

Dipindai dengan CamScanner

29. Kecamatan Borbor;
30. Kecamatan Habinsaran;
31. Kecamatan Laguboti;
32. Kecamatan Lumban Julu;
33. Kecamatan Parmaksian;
34. Kecamatan Porsea;
35. Kecamatan Siantar Narumonda;
36. Kecamatan Silaen;
37. Kecamatan Tampahan;
38. Kecamatan Uluan;
39. Kecamatan Nassau;
40. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
41. Kecamatan Sigumpar

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Tahapan Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk memastikan telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 09 Juli 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB.TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
b.Kepala Bagian Hukum

LUSIANA JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP. PJ750804 200502 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba;
2. Inspektur Kabupaten Toba;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

K A T A P E N G A N T A R

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, atas disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal (343) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau terjadi perubahan yang mendasar; atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan merugikan kepentingan nasional.

Rancangan akhir perubahan rencana kerja ini telah mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk periode rencana pembangunan Tahun 2025-2029, disusun mengacu pada rancangan akhir perubahan RKPD Tahun 2025, rencana strategis perangkat daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan akhir (Ranhir) perubahan rencana kerja perangkat daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama perubahan RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Kami menyadari dokumen rancangan akhir perubahan rencana kerja ini tidak dapat tersusun tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dan disadari penyusunan rancangan akhir perubahan rencana kerja ini masih belum optimal. Akan tetapi harapannya dokumen ini memberi manfaat dalam upaya meningkatkan kinerja yang lebih baik dimasa yang mendatang. Demikian rancangan akhir perubahan rencana kerja ini kami buat sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan akhir perubahan rencana kerja yang memuat program dan kegiatan tahun 2025.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

BALIGE, 2025

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TOBA

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

FREDDY ADVENT PANJAITAN,S.Sos.MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19781203 200502 1 003

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			iii
DAFTAR TABEL			v
DAFTAR GAMBAR			viii
BAB I	**PENDAHULUAN**		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	4
	1.3	Maksud dan Tujuan	5
	1.4	Sistematika Penuisan	6
BAB II	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**		8
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
	2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD	38
		2.3.1. Analisis Lingkungan Internal	39
		2.3.2. Analisis Lingkungan Eksternal	40
	2.4	Review terhadap Perubahan RKPD 2025	42
	2.5	Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	47
BAB III	**TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**		49
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	49
		3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	49
		3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah	50
	3.2	Tujuan, Sasaran, dan Program beserta Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program	51

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba
3.2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba 51
3.2.2. Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba 52
3.2.3. Program dan Indikator Program Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba 54
3.3 Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025 56
BAB IV PENUTUP 92

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Keterangan Tabel	Halaman
Tabel	2.1.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba sampai dengan Bulan April Tahun 2025	10
Tabel	2.1.2	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten sampai dengan Bulan Maret Tahun 2025	13
Tabel	2.1.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Bulan Maret Tahun 2025 sampai dengan Bulan Maret Tahun 2025	25
Tabel	2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba	35
Tabel	2.4.1	Review terhadap P-RKPD TTahun 2025	43
Tabel	2.5.1	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Toba	48
Tabel	3.2.1.a	Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026	51
Tabel	3.2.1.b	Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029	52
Tabel	3.2.2.a	Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026	53
Tabel	3.2.2.b	Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029	53
Tabel	3.2.3.a	Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026	54
Tabel	3.2.3.b	Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029	55

Tabel	3.3.1	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025	58
Tabel	3.3.2	Perbandingan Pagu Renstra 2025 dengan Pagu Rancangan Akhir P-Renja 2025	78
Tabel	3.3.3	Rencana Kerja dari SIPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025	79

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Keterangan Gambar	Halaman
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Perangkat Daerah	33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan, kepala organisasi perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman pada Renstra OPD dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang. Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdiri dari 4 (empat) pendekatan, yaitu : (1). Politik, (2). Teknokratik (3). Partisipatif dan (4) atas-bawah (*top down*) dan bawah atas *(bottom-up*). Sedangkan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: (1) Penyusunan rencana, (2) Penetapan rencana, (3) Pengendalian pelaksanaan rencana, (4) Evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan dan secara keseluruhan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh. Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan tahunan OPD yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Didalam Rencana Kerja OPD juga memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra OPD dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan pada Pasal (343) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Kabupaten Toba sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2025 menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba merupakan dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun berjalan guna mengoperasionalkan Perubahan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahun berjalan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 360 ayat (2), bahwa penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2).

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan pada tahun berjalan yang diperlukan untuk kesesuaian perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan, berfungsi sebagai bahan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan dasar dalam proses penyusunan dan penganggaran P-APBD untuk Tahun Anggaran 2025. Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, maka perlu diadakan perubahan untuk penyesuaian indikator dan target kinerja kegiatan/subkegiatan didasarkan pada output yang dihasilkan dapat diadakan perubahan dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa penyusunan rancangan Perubahan Renja perangkat daerah dilakukan setelah perangkat daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan perubahan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja perangkat daerah berpedoman pada:

a. Rancangan perubahan RKPD.
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan rancangan perubahan Renja perangkat daerah terdiri atas:

a. Perumusan rancangan perubahan Renja perangkat daerah; dan
b. Penyajian rancangan perubahan Renja perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolahan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

8. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Toba Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025. Selain dari pada itu, dokumen Perubahan Rencana Kerja ini bermaksud untuk memberikan penegasan kembali dalam bentuk dokumen kertas kerja kepada seluruh stakeholder di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba tentang tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Perubahan Rencana Kerja yang dimulai dari perencanaan (formulasi kebijakan), pelaksanaan program kegiatan (implementasi kebijakan) dan monitoring evaluasi kebijakan.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.
2. Penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan dengan visi, misi,dan arah kebijakan kepala daerah terpilih yang dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Toba tahun 2025-2029.
3. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang.

4. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah.
5. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 361 ayat (3), adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Perubahan RKPD 2025 dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja OPD serta Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan tentang ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan (Tahun n) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Evaluasi Rencana Kerja tahun berkenaan. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025 menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba selama Tahun 2025. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan. Untuk itu dalam tahapan berikutnya diuraikan rangkaian pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, Dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja diikuti penetapan besaran indikator kinerja setiap jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba ditunjang dengan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Daerah APBD Tahun 2025 yang dialokasikan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba terdiri dari anggaran belanja daerah sebesar Rp. 5.387.294.271,00,- dan yang terealisasi hingga bulan April Tahun 2025 sebesar Rp. 475.748.201.,00,- atau 8,83 %, dengan 6 program, 10 kegiatan, dan 20 sub kegiatan. Adapun capaian kinerja keuangan menyentuh angka 8,83% dan capaian kinerja fisik mencapai angka 24,17% (sesuai RFK bulan April Tahun 2025).

Untuk lebih lengkapnya realisasi fisik dan keuangan hingga bulan April tahun anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba dapat di lihat pada tabel 2.1.1 berikut ini:

Tabel 2.1.1

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SAMPAI DENGAN BULAN APRIL TAHUN 2025

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI		KET
								KEUANGAN	FISIK	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYAAN DASAR	**5.387.294.271,00**				
8					**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**5.387.294.271,00**	**475.748.201,00**	**8,83**	**18,03**	
8	01				**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**5.387.294.271,00**	**475.748.201,00**	**8,83**	**18,03**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.918.217.928,45**	**475.748.201,00**	**16,30**	**18,03**	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.831.103,60	-	-	-	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.787.702,00	-	-	-	
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.043.401,60	-	-	-	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.638.599.680,00	475.748.201,00	18,03	18,03	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.638.599.680,00	475.748.201,00	18,03	18,03	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.267.144,85	-	-	-	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.283.160,00	-	-	-	
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.969.903,00	-	-	-	
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.184.480,00	-	-	-	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.485.601,85	-	-	-	
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.240.000,00	-	-	-	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.104.000,00	-	-	-	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.500.000,00	-	-	-	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.500.000,00	-	-	-	
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	-	-	-	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.020.000,00	-	-	-	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.600.000,00	-	-	-	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.420.000,00	-	-	-	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**688.589.124,89**	**-**	**-**	-	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	404.613.517,13	-	-	-	
8	01	02	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	283.975.607,76	-	-	-	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**638.554.469,80**	**-**	**-**	-	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	638.554.469,80	-	-	-	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	638.554.469,80	-	-	-	

8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**652.948.780,70**	**-**	**-**	-	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	652.948.780,70	-	-	-	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	652.948.780,70	-	-	-	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**143.127.377,16**	**-**	**-**	-	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	143.127.377,16	-	-	-	
8	01	05	2.01	01	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	143.127.377,16	-	-	-	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**345.856.590,00**	**-**	**-**	-	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	345.856.590,00	-	-	-	
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	159.259.272,00	-	-	-	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	186.597.318,00	-	-	-	

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten hingga bulan Maret Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel 2.1.2 berikut ini:

TABEL 2.1.2

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN

SAMPAI DENGAN BULAN MARET TAHUN 2025

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan (*output*) Sub Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Satuan indikator	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6	7		8		9			13 = 9+10+11+12		14=7+13		15=14/5X100 %		16
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
H	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																			
I	**Kesatuan Bangsa dan Politik**																			
	43	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**																		
		Meningkatnya Wawasan Kebangsaan serta Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**																	
		1 **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan**	**72,75**	**2.910.000.000,00**	**%**	**48,50**	**639.105.200,00**	**60,62**	**687.000.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639.105.200,00**	**0,00**	**0,22**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	***Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan***	***24,00***	***2.910.000.000,00***	***kegiatan***	***7,00***	***639.105.200,00***	***10,00***	***687.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7,00***	***639.105.200,00***	***0,29***	***0,22***	***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	0,00	0,00	Dokumen	5,00	9.979.649,00	1,00	10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	9.979.649,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan

			Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun																Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0,00	0,00	Orang	250,00	45.088.970,00	250,00	125.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50,00	45.088.970,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7.500,00	2.910.000.000,00	Orang	5.200,00	266.797.267,00	5.450,00	132.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.040,00	266.797.267,00	0,14	0,09	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0,00	0,00	Laporan	4,00	10.000.000,00	12,00	20.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,80	10.000.000,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0,00	0,00	Keluarga	0,00	0,00	100,00	150.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	0,00	0,00	Orang	22,00	307.239.314,00	40,00	200.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4,40	307.239.314,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila			Orang			20,00	50.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan

																				Bangsa dan Politik
	Rata-rata capaian kinerja (%)																	**0,00%**	**21,96 %**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	Predikat Kinerja																	**Sangat rendah**	**Sangat rendah**	
		2	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per 10.000 penduduk.**	**36,37**	**5.703.500.000,00**	**%**	**28,20**	**35.632.513.456,00**	**24,25**	**1.076.423.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.632.513.456,00**	**0,00**	**6,25**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	***Jumlah Pemantauan dan perkembangan situasi Politik***	***12,00***	***5.703.500.000,00***	***Laporan***	***36,00***	***35.632.513.456,00***	***12,00***	***1.076.423.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***35.632.513.456,00***	***3,00***	***6,25***	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.250,00	4.575.000.000,00	Orang	650,00	35.476.514.280,00	400,00	886.423.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	650,00	35.476.514.280,00	0,52	7,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	150,00	338.500.000,00	Orang	0,00	0,00	100,00	70.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

				Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12,00	790.000.000,00	Laporan	12,00	155.999.176,00	12,00	20.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12,00	155.999.176,00	1,00	0,20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka			kegiatan			1,00	100.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Rata-rata capaian kinerja (%)																		**0,00%**	**6,25**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	Predikat Kinerja																		**Sangat rendah**	**Sangat rendah**	
		3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Pertambahan Ormas**	**20,00**	**1.540.000.000,00**	**%**	**17,53**	**231.902.106,00**	**20,00**	**420.000.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.902.106,00**	**0,00**	**0,15**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	***Persentase Ormas dan LSM yang ber SKT dan aktif***	***100,00***	***1.540.000.000,00***	***%***	***87,67***	***231.902.106,00***	***100,00***	***420.000.000,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***231.902.106,00***	***0,00***	***0,15***	***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***

			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500,00	1.000.000.000,00	Orang	250,00	168.116.124,00	250,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	168.116.124,00	0,50	0,17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0,00		Laporan			100,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	12,00	540.000.000,00	Laporan	12,00	63.785.982,00	12,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	63.785.982,00	1,00	0,12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Rata-rata capaian kinerja (%)																	**0,00%**	**15,06 %**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	Predikat Kinerja																	**Sangat rendah**	**Sangat rendah**	
		Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		**Angka kriminalitas**																
		4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Penurunan jumlah kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika**	**5,00**	**1.190.000.000,00**	**%**	**5,00**	**120.729.935,00**	**5,00**	**160.000.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.729.935,00**	**0,00**	**0,10**	**Bidang Kesatuan Bangsa**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	***Jumlah tersosialisasinya P4GN***	***3,00***	***1.190.000.000,00***	***Kegiatan***	***6,00***	***120.729.935,00***	***3,00***	***160.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6,00***	***120.729.935,00***	***2,00***	***0,10***	***Bidang***

			Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																		***Kesatuan Bangsa***
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0,00	0,00	Dokumen	1,00	17.090.371,00	1,00	10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,20	17.090.371,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Bidang Kesatuan Bangsa
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0,00	0,00	Orang	0,00	0,00	100,00	70.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Bidang Kesatuan Bangsa
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500,00	1.190.000.000,00	Orang	100,00	85.392.264,00	100,00	60.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20,00	85.392.264,00	0,04	0,07	Bidang Kesatuan Bangsa
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0,00	0,00	Laporan	4,00	18.247.300,00	12,00	20.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,80	18.247.300,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Bidang Kesatuan Bangsa
	Rata-rata capaian kinerja (%)																		**0,00%**	**10,15 %**	**Badan Kesatuan Bangsa dan**
	Predikat Kinerja																		**Sangat rendah**	**Sangat rendah**	

																				Politik
		5	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penyelesaian Konflik Sosial**	**100,00**	**3.280.000.000,00**	**%**	**100,00**	**489.927.990,00**	**100,00**	**510.000.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489.927.990,00**	**0,00**	**0,15**	**Bidang Kesatuan Bangsa**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	***Jumlah laporan Konflik Sosial yang terselesaikan***	***12,00***	***3.280.000.000,00***	***Laporan***	***24,00***	***489.927.990,00***	***12,00***	***510.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***24,00***	***489.927.990,00***	***2,00***	***0,15***	***Bidang Kesatuan Bangsa***
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3,00	1.200.000.000,00	Dokumen	3,00	136.544.263,00	3,00	10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3,00	136.544.263,00	1,00	0,11	Bidang Kesatuan Bangsa
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0,00	0,00	Orang	150,00	66.412.842,00	200,00	150.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	150,00	66.412.842,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Bidang Kesatuan Bangsa
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	500,00	870.000.000,00	Orang	200,00	84.248.685,00	200,00	180.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	200,00	84.248.685,00	0,40	0,10	Bidang Kesatuan

			Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	Bangsa
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12,00	350.000.000,00	Laporan	12,00	19.960.000,00	12,00	20.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12,00	19.960.000,00	1,00	0,06	Bidang Kesatuan Bangsa
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4,00	860.000.000,00	Dokumen	4,00	182.762.200,00	4,00	150.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4,00	182.762.200,00	1,00	0,21	Bidang Kesatuan Bangsa
	Rata-rata capaian kinerja (%)																		**0,00%**	**14,94 %**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	Predikat Kinerja																		**Sangat rendah**	**Sangat rendah**	
		6	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN KINERJA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**100,00**	**14.831.328.301,00**	**%**	**72,22**	**2.497.212.780,00**	**100,00**	**3.092.593.000,00**	**3,57**		**378.976.250,00**	**3,57**	**378.976.250,00**	**3,57**	**2.876.189.030,00**	**0,04**	**0,19**	**Bidang Kesatuan Bangsa**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah***	***100,00***	***620.000.000,00***	**%**	***100,00***	***88.079.510,00***	***100,00***	***75.000.000,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***88.079.510,00***	***0,00***	***0,14***	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,00	360.000.000,00	Dokumen	4,00	52.337.990,00	4,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	52.337.990,00	1,00	0,15	

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,00	260.000.000,00	Laporan	6,00	35.741.520,00	6,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	35.741.520,00	1,00	0,14	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Cakupan layanan administrasi keuangan***	***100,00***	***11.330.000.000,00***	***%***	***100,00***	***2.021.127.285,00***	***100,00***	***2.371.093.000,00***	***25,00***		***378.976.250,00***	***25,00***	***378.976.250,00***	***25,00***	***2.400.103.535,00***	***0,25***	***0,21***	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20,00	11.330.000.000,00	Orang/Bulan	20,00	2.021.127.285,00	20,00	2.371.093.000,00	18,00	0,00	378.976.250,00	20,00	378.976.250,00	40,00	2.400.103.535,00	2,00	0,21	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Cakupan layanan administrasi kepegawaian***	***100,00***	***115.000.000,00***	***%***	***0,00***	***31.716.000,00***	***100,00***	***100.000.000,00***	***0,00***	0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***31.716.000,00***	***0,00***	***0,28***	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	20,00	115.000.000,00	Orang	5,00	31.716.000,00	2,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.716.000,00	5,00	63.432.000,00	0,25	0,55	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Cakupan layanan administrasi umum***	***100,00***	***1.268.000.000,00***	***%***	***100,00***	***245.370.685,00***	***100,00***	***375.000.000,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***245.370.685,00***	***0,00***	***0,19***	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	55.000.000,00	Paket	4,00	832.916,00	4,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	832.916,00	1,00	0,02	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00	275.000.000,00	Paket	4,00	33.634.874,00	4,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	33.634.874,00	1,00	0,12	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4,00	80.000.000,00	Paket	4,00	1.795.975,00	4,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.795.975,00	1,00	0,02	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	75.000.000,00	Paket	4,00	11.078.355,00	4,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	11.078.355,00	1,00	0,15	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4,00	48.000.000,00	Dokumen	4,00	3.840.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3.840.000,00	1,00	0,08	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	75.000.000,00	Laporan	12,00	6.082.400,00	12,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6.082.400,00	1,00	0,08	

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	660.000.000,00	Laporan	12,00	188.106.165,00	12,00	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	188.106.165,00	1,00	0,29	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**15.000.000**	**%**	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***15.000.000,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00	0,00	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	15.000.000	Unit			1	15.000.000	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Cakupan Jasa Penunjang Kinerja Aparatur***	***100,00***	***808.328.301,00***	***%***	***66,67***	***49.366.800,00***	***100,00***	***32.500.000,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***49.366.800,00***	***0,00***	***0,06***	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	19.500.000,00	Laporan	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	143.828.301,00	Laporan	12,00	1.186.800,00	12,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.186.800,00	1,00	0,01	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4,00	645.000.000,00	Laporan	12,00	48.180.000,00	12,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	48.180.000,00	3,00	0,07	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah***	***100,00***	***675.000.000,00***	***%***	***66,67***	***61.552.500,00***	***100,00***	***124.000.000,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***61.552.500,00***	***0,00***	***0,09***	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4,00	315.000.000,00	Unit	4,00	47.980.900,00	4,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	47.980.900,00	0,20	0,15	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15,00	60.000.000,00	Unit	21,00	13.571.600,00	21,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	13.571.600,00	0,28	0,23	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	300.000.000,00	Unit	0,00	0,00	1,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	**3,57%**	**19,39 %**	**Badan Kesat**

	Predikat Kinerja													**Sangat rendah**	**Sangat rendah**	**uan Bangsa dan Politik**
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**29.454.828.301,00**			**39.611.391.467,00**		**5.946.016.000,00**			**378.976.250,00**		**378.976.250,00**		**39.990.367.717,00**			**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														**0,60%**	**117,7%**	
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													**Sangat rendah**	**Sangat Tinggi**	

Untuk lebih lengkapnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja perangkat daerah dan pencapaian Renstra perangkat daerah s/d bulan Maret Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1.3 berikut ini:

TABEL 2.1.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Bulan Maret Tahun 2025

Kabupaten Toba

SAMPAI DENGAN BULAN MARET TAHUN 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*), Kegiatan (*Output*), Sub Kegiatan (*Output*)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinejra Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
H.UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																						
Kesatuan bangsa dan politik.																						
43. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
8	**01**	**02**	**00**	**00**	**00**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan**	**%**	**72,75**	**2.910.000.000,00**	**48,50**	**639.105.200,00**	**60,62**	**687.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**639.105.200,00**	**0,00%**	**21,96%**
8	01	02	2	01	00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	kegiatan	24,00	2.910.000.000,00	7,00	639.105.200,00	10,00	687.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,00	639.105.200,00	29,17%	21,96%
8	**01**	**03**	**00**	**00**	**00**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per 10.000 penduduk.**	**%**	**36,37**	**5.703.500.000,00**	**28,20**	**35.632.513.456,00**	**24,25**	**1.076.423.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**35.632.513.456,00**	**0,00%**	**624,75%**
8	01	03	2	01	00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pemantauan dan perkembangan situasi Politik	Laporan	12,00	5.703.500.000,00	36,00	35.632.513.456,00	12,00	1.076.423.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	36,00	35.632.513.456,00	300,00%	624,75%
8	**01**	**04**	**00**	**00**	**00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Pertambahan Ormas**	**%**	**20,00**	**1.540.000.000,00**	**17,53**	**231.902.106,00**	**20,00**	**420.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**231.902.106,00**	**0,00%**	**15,06%**
8	01	04	2	01	00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang ber SKT dan aktif	%	100,00	1.540.000.000,00	87,67	231.902.106,00	100,00	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	87,67	231.902.106,00	87,67%	15,06%

8	**01**	**05**	**00**	**00**	**00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Penurunan jumlah kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika**	**%**	**5,00**	**1.190.000.000,00**	**5,00**	**120.729.935,00**	**5,00**	**160.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**120.729.935,00**	**0,00%**	**10,15 %**
8	01	05	2	01	00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah tersosialisasinya P4GN	Kegiatan	3,00	1.190.000.000,00	6,00	120.729.935,00	3,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,00	120.729.935,00	200,00%	10,15 %
8	**01**	**06**	**00**	**00**	**00**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penyelesaian Konflik Sosial**	**%**	**100,00**	**3.280.000.000,00**	**100,00**	**489.927.990,00**	**100,00**	**510.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**489.927.990,00**	**0,00%**	**14,94 %**
8	01	06	2	01	00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan Konflik Sosial yang terselesaikan	Laporan	12,00	3.280.000.000,00	24,00	489.927.990,00	12,00	510.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	24,00	489.927.990,00	200,00%	14,94 %
8	**01**	**01**	**0**	**00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN KINERJA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**%**	**100,00**	**14.816.328.301,00**	**72,22**	**2.497.212.780,00**	**100,00**	**3.092.593.000,00**	**3,57**	**378.976.250,00**	**3,57%**	**12,25 %**	**3,57**	**2.876.189.030,00**	**3,57%**	**19,41 %**
8	01	01	2	01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	620.000.000,00	100,00	88.079.510,00	100,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	88.079.510,00	0,00%	14,21 %
8	01	01	2	02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	%	100,00	11.330.000.000,00	100,00	2.021.127.285,00	100,00	2.371.093.000,00	25,00	378.976.250,00	25,00%	15,98 %	25,00	2.400.103.535,00	25,00%	21,18 %
8	01	01	2	05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	%	100,00	115.000.000,00	0,00	31.716.000,00	100,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	31.716.000,00	0,00%	27,58 %
8	01	01	2	06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	%	100,00	1.268.000.000,00	100,00	245.370.685,00	100,00	375.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	245.370.685,00	0,00%	19,35 %
8	01	01	2	08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	%	100,00	808.328.301,00	66,67	49.366.800,00	100,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	49.366.800,00	0,00%	6,11%
8	01	01	2	09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100,00	675.000.000,00	66,67	61.552.500,00	100,00	124.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	61.552.500,00	0,00%	9,12%
		TOTAL								**29.439.828.301,00**		**39.611.391.467,00**		**5.946.016.000,00**		**378.976.250,00**	**0,60%**	**2,04%**		**39.990.367.717,00**	**0,60%**	**117,71%**

Dari Tabel 2.1.2 dan Tabel 2.1.3 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 hingga bulan April Tahun 2025 sangat rendah sehingga predikat kinerja sangat rendah. Rendahnya capaian tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target program tidak dapat semua dikerjakan. Disamping itu juga, kurangnya SDM juga menjadi faktor penyebab rendahnya pencapian target program tersebut. Rata-rata capaian kinerja Renja dari ke 6 program hingga bulan April tahun 2025 masih ***sangat rendah*** yaitu sebesar 8,83% dan rata-rata realisasi anggaran sebesar 8,83 %. Capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra dan Renja dari ke 6 program yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Pagu Indikatif RKPD 2025 sebelumnya Rp. 5.946.016.000,00 setelah Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp 5.387.294.271,00,-. Penggunaan Anggaran Belanja Langsung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp 475.748.201,- atau 8,83 %. Pelaksanaan Evaluasi terhadap Hasil Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

1 ***Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.***

Untuk perencanaan Tahun 2025 pada dokumen Renstra Badan Kesbangpol telah ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp.650.000.000,- dengan target capaian kinerja sebesar 60,62%. dan untuk Renja Badan Kesbangpol ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp. 688.589.124,89,- dengan target capaian kinerja sebesar 60,62%. Dari pagu Renstra dan Renja ini dapat dilihat sebesar 5,94 % diakomodir dari target pagu Renstra pada Renja 2025. Hingga bulan April 2025 realisasi pagu program masih sebesar Rp 0,00.,-. kenaikan ini disebabkan seluruh pelaksanaan upacara besar kenegaraan dan pembentukan paskibra semula dikelola OPD lain

2 ***Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik***

Untuk perencanaan Tahun 2025 pada dokumen Renstra Badan Kesbangpol telah ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp. 1.020.500.000,00- dengan target capaian kinerja sebesar 24,25%. dan untuk Renja Bakesbangpol ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp. 638.554.469,8,- dengan target capaian kinerja sebesar 24,25%. Dari pagu Renstra dan Renja ini dapat dilihat sebesar 37,43 % diakomodir dari target pagu Renstra pada Renja 2025.

Hingga bulan April 2025 realisasi pagu program masih sebesar Rp 0,00.,-. Penurunan ini disebabkan karena terdapat kesalahan perhitungan besaran dana hibah partai politikS (Human Eror).

3 ***Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***

Untuk perencanaan Tahun 2025 pada dokumen Renstra Badan Kesbangpol telah ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp.320.000.000,- dengan target capaian kinerja sebesar 20%. dan untuk Renja Badan Kesbangpol ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp. 652.948.780,7,- dengan target capaian kinerja sebesar 20%. Dari pagu Renstra dan Renja ini dapat dilihat sebesar 104,05 % diakomodir dari target pagu Renstra pada Renja 2025. Hingga bulan April 2025 realisasi pagu program masih sebesar Rp 0,00.,-. Kenaikan ini disebabkan karena adanya pertambahan jumlah ormas penerima dana hibah.

4 ***Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***

Untuk perencanaan Tahun 2025 pada dokumen Renstra Badan Kesbangpol telah ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp.270.000.000,- dengan target capaian kinerja sebesar 5%. dan untuk Renja Badan Kesbangpol ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp. 143.127.377,16,- dengan target capaian kinerja sebesar 5%.

Dari pagu Renstra dan Renja ini dapat dilihat sebesar 53,01 % diakomodir dari target pagu Renstra pada Renja 2025. Hingga bulan April 2025 realisasi pagu program masih sebesar Rp 0,00.,-.

5 ***Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial***

Untuk perencanaan Tahun 2025 pada dokumen Renstra Badan Kesbangpol telah ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp.700.000.000,- dengan target capaian kinerja sebesar 100%. dan untuk Renja Bakesbangpol ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp. 345.856.590,- dengan target capaian kinerja sebesar 100%. Dari pagu Renstra dan Renja ini dapat dilihat sebesar 50,59 % diakomodir dari target pagu Renstra pada Renja 2025. Hingga bulan April 2025 realisasi pagu program masih sebesar Rp 0,00.,-.

6 **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***

Untuk perencanaan Tahun 2025 pada dokumen Renstra Badan Kesbangpol telah ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp. 2.944.682.880,- dengan target capaian kinerja sebesar 100%. dan untuk Renja Badan Kesbangpol ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp. 2.918.217.928,45,- dengan target capaian kinerja sebesar 100%. Dari pagu Renstra dan Renja ini dapat dilihat sebesar 99,10 % diakomodir dari target pagu Renstra pada Renja 2025. Hingga bulan April 2025 realisasi pagu program masih sebesar Rp 475.748.201.,-. Dari realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Renstra dari program ini masih sangat rendah yaitu sebesar 16,30 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba yang ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2021-2026, hal ini dikarenakan tidak ada acuan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba, dapat dijabarkan bahwa Badan Kesbangpol mempunyai kedudukan sebagai unsur Pemerintah Umum dalam melaksanakan tugasnya yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretais Daerah. Dengan kedudukan tersebut Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pemerintahan Umum. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Administrasi Umum, Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Serta Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri Dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antar suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya, Pembinaan

Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial;

3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;
4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial ;
5. Pelaksanaan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten ;
6. Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik;
7. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
8. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Sesuai Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dalam menjalankan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik telah membentuk bidang-bidang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program dan kegiatan pembangunan serta telah melibatkan secara aktif peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan. Bidang-bidang tersebut meliputi:

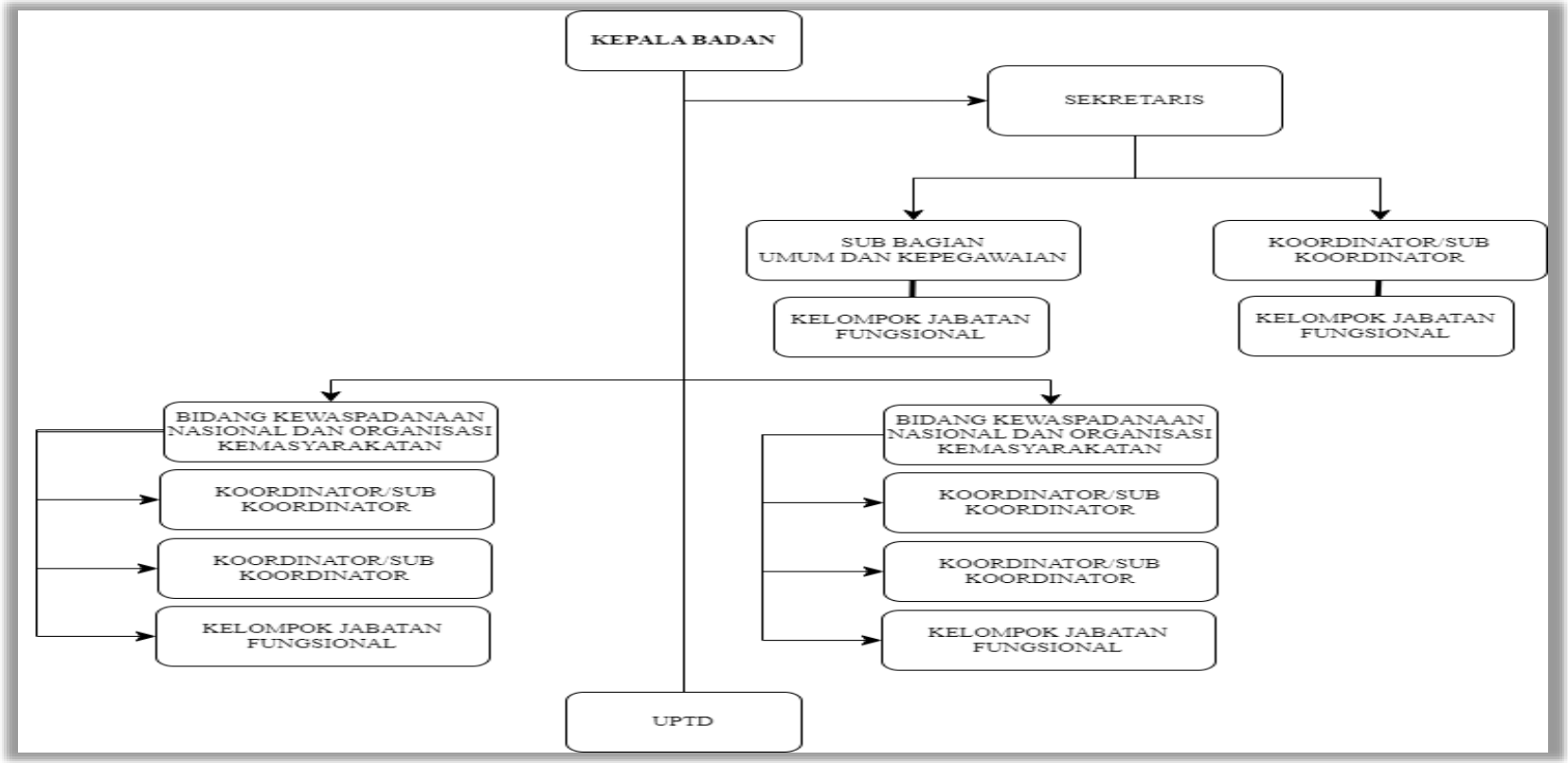
1. Bidang Sekretariat;
2. Bidang Kesatuan Bangsa;
3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas.

Bidang Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian badan.

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesatuan bangsa yaitu penyusunan program kerja, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan, melaksanakan koordinasi, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;

Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas melaksanakan tugas di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, yaitu melaksanakan penyusunan program kerja, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan, melaksanakan koordinasi, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;

Sesuai dengan Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah maka bagan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Utama (IKU), Indikator Kinerja Sasaran (IKS) dan Indikator Kinerja Kinerja Program (IKP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupate Toba sampai dengan Triwulan II pada Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel 2.2.1 berikut :

Tabel 2.2.1 (TC-30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba

NO		Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
1		2	3	4	5	6	7	8		9	10			11	12	13
I	**IKU (Indikator Kinerja Utama)**															
1		Pemahaman Wawasan Kebangsaan			51,71	57,77	7,00	10,00	13,00	48,95	58,87	6,60	6,60	101,90	94,29	
II	**IKS (Indikator Kinerja Sasaran)**															
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu			79,17	79,17	81,38	81,38	81,38	79,17	79,17	78,55	78,55	100,00	96,51	
		Angka kriminalitas			0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,15	0,27	0,20		92,70	71,03	
III	**IKP (Indikator Kinerja Program)**															
1		Persentase Masyarakat yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan			24,25	36,37	48,50	60,62	72,75	18,74	38,57	67,92		106,04	140,05	
2		Rasio Masyarakat yang Mendapat Pendidikan Politik per 10.000 Penduduk.			12,12	12,12	24,25	24,25	35,13	11,99	10,10	28,55		83,33	117,74	
3		Persentase Pertambahan Ormas			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	17,00	17,53	20,00		87,67	100,00	
4		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,45	0,50	1,57		10,00	31,40	
5		Persentase Penyelesaian Konflik Sosial			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	60,98		100,00	60,98	
6		Cakupan kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	67,01	87,67	100,00	3,57	87,67	100,00	

Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran (IKS)

Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025, yaitu :

1. **Tingkat Partisipasi dalam Pemilu**

   Untuk Tahun 2025, Kabupaten Toba telah melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif. Maka dari target capaian indikator sebesar 81,38 %. Pada saat Triwulan II Tahun 2025 terealisasi sebesar 78,55 % (Pemilu Tahun 2024) atau tercapai 96,52 %.

2. **Angka Kriminalitas**

   Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial yang diukur dari persentase angka kriminalitas dengan target 0,27 %, data angka kriminalitas diperoleh dari Polres Toba yaitu angka kriminalitas 0 kasus pada jumlah penduduk Kabupaten Toba 217.128 jiwa. Realisasi pada Triwulan II belum terdapat kasus dengan persentase sebesar nol %.

Evaluasi Indikator Kinerja Program

Evaluasi Indikator Kinerja Kinerja Program (IKP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025, yaitu :

1. **Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan** dengan target sebesar 60,62 %. Pada saat Triwulan I sampai Triwulan II kegiatan sebagian besar telah dilaksanakan dan terealisasi. Maka dari itu realisasi sampai dengan sekarang (Triwulan II) sebesar 0,00 % atau sebesar 0,0 persen
2. **Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per 10.000 penduduk** dengan target 24,25% dan realisasi capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan II sebesar nol %
3. **Persentase pertambahan organisasi masyarakat** dengan target 20,00 % dan realisasi capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan II sebesar nol %
4. **Persentase penurunan jumlah kasus narkotika dan prekusor narkotika** dengan target 5,00 % dan realisasi capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan II sebesar nol %

5. **Persentase penyelesaian konflik sosial** dengan target 100 % dan realisasi capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan II sebesar 0 %
6. **Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah** dengan target 100 % dan realisasi capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan II sebesar 16,30 %

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui optimalisasi peran dan fungsi pokja pengembangan demokrasi dalam meningkatkan capaian IDI dengan prioritas meningkatkan kegiatan yang mendukung capaian IDI ditingkat Nasional;
2. Peningkatan efektifitas tugas FORKOPIMDA dan FORKOPIMCAM sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat di wilayah kerja masing-masing;
3. Penataan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dengan menyiapkan fasilitasi pelayanan pendaftaran melalui SIORMAS, pembentukan tim terpadu pengawasan ormas, kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah serta peningkatan kapasitas dan kelembagaan partai politik dalam rangka mewujudkan tata kelola bantuan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel;
5. Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan narkotika serta revitalisasi pelaksanaan promosi budaya, pagelaran seni dan budaya, pameran produk unggulan ekonomi daerah, seminar dan lokakarya;
6. Penanganan konflik sosial, potensi, ancaman, hambatan dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini, penguatan pengawasan orang asing, ormas asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing serta penanganan pengungsi luar negeri;

7. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan pembauran kebangsaan, peningkatan kesadaran bela negara, pelaksanaan gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu serta Penguatan Pendidikan Karakter di Daerah;

Badan kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan- permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman) sebagai berikut:

2.3.1 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal merupakan uraian tentang dimensi kekuatan (strong) dan kelemahan (Weakness). Adapun faktor tersebut dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba adalah :

a. Faktor Kekuatan *(Strong)*

i. Adanya landasan hukum tentang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik ;

ii. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Badan Kesbangpol sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

iii. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas Badan Kesbangpol
iv. Adanya dukungan ketersediaan dana APBD Kabupaten Toba

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

i. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
ii. Struktur organisasi pada Badan Kesbangpol Kabupaten Toba belum terisi oleh eselon II
iii. Belum tersedianya data – data dalam pembuatan peta rawan konflik sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
iv. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Kegiatan ;
v. Integritas, dedikasi, dan komitmen dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah dijadwalkan, masih perlu ditingkatkan.
vi. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.

2.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal merupakan aktivitas analisis tentang dimensi peluang ***(Opportunity)*** dengan ancaman ***(Threat).*** Adapun faktor tersebut dari dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba adalah :

a. **Faktor Peluang *(Opportunity)***

i. Tingginya partisipasi masyarakat dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;
ii. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang Wawasan kebangsaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko rawan konflik ;
iii. Adanya dukungan dari lembaga/instansi pemerintahan yang terkait;
iv. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
v. Belum semua kategori masyarakat mendapat pendidikan Politik, Wawasan kebangsaan dan Pembinaan P4GN.

b. **Faktor Ancaman *(Threat)***

i. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
ii. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
iii. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.
iv. Tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
v. Kondisi geografis di beberapa wilayah di Kabupaten Toba, seperti daerah pegunungan, kepulauan luar, daerah terpencil dan daerah perbatasan, membatasi jangkauan

akses Pemerintah Daerah melakukan pemantauan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat.

vi. Kebijakan pemerintah daerah yang masih kurang berpihak pada masyarakat.

2.4. Review terhadap Perubahan RKPD 2025

Review terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target atau tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan. Program dan kegiatan yang ada pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Toba dengan hasil analisis kebutuhan (usulan Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba tidak terdapat perubahan terhadap besarnya pagu indikatif atau besarnya jumlah anggaran yang diusulkan untuk membiayai rencana kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2025. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap P-RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4.1 berikut:

TABEL 2.4.1

Review terhadap P-RKPD TTahun 2025

Kabupaten Toba

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Rancangan Akhir RKPD						Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					**5.387.294.271**	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	Kab. Toba				**5.387.294.271**
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**Kab. Toba**				**5.387.294.271**	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**Kab. Toba**				**5.387.294.271**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Toba	**Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**2.918.217.928**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Toba	**Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**2.918.217.928**
I.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Toba	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**52.831.104**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Toba	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**52.831.104**
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	28.787.702	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kab. Toba**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	28.787.702
02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Toba	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	24.043.402	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Toba	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	24.043.402
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Toba	**Cakupan layanan Administrasi keuangan**	**%**	**100**	**2.638.599.680**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Toba	**Cakupan layanan Administrasi keuangan**	**%**	**100**	**2.638.599.680**
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kab. Toba**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	20	2.638.599.680	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kab. Toba**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	20	2.638.599.680
I.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Toba	**Cakupan layanan Administrasi umum**	**%**	**100**	**137.267.145**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Toba	**Cakupan layanan Administrasi umum**	**%**	**100**	**137.267.145**
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Toba	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1.283.160	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Toba	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1.283.160
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Toba	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.969.903	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Toba	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.969.903

03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kab. Toba**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	2.184.480	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kab. Toba**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	2.184.480
04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Toba	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	7.485.602	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Toba	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	7.485.602
06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Toba	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	5.240.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Toba	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	5.240.000
07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	105.104.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	105.104.000
I.4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Toba	**Cakupan Jasa Penunjang Kinerja Aparatur**	**%**	**100**	**32.500.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Toba	**Cakupan Jasa Penunjang Kinerja Aparatur**	**%**	**100**	**32.500.000**
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.500.000,00
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000,00
I5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Toba	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**57.020.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Toba	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**57.020.000**
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Toba	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	55.600.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Toba	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	55.600.000,00
02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	1.420.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	1.420.000,00
II	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Kab. Toba**	Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	**%**	60, 62	**688.589.125**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Kab. Toba**	Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	**%**	60, 62	**688.589.125**
II.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Kab. Toba**	Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	**kegiatan**	**10**	**688.589.125**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Kab. Toba**	Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	**kegiatan**	**10**	**688.589.125**
02	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Toba	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	250	404.613.517,13	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	250	404.613.517,13
06	Pembentukan Paskibraka	Kab. Toba	Jumlah Paskibraka	Orang	40	283.975.607,76	Pembentukan Paskibraka	Kab. Toba	Jumlah Paskibraka	Orang	40	283.975.607,76
III	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN**	**Kab. Toba**	Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per 10.000 penduduk.	**%**	**24, 25**	**638.554.470**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN**	**Kab. Toba**	Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per 10.000 penduduk.	**%**	**24, 25**	**638.554.470**

	PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						**PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**					
III.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Kab. Toba	Jumlah Pemantauan dan perkembangan situasi Politik	**Laporan**	**12**	**638.554.470**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Kab. Toba	Jumlah Pemantauan dan perkembangan situasi Politik	**Laporan**	**12**	**638.554.470**
01	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Toba	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	400	638.554.469,80	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Toba	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	400	638.554.469,80
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Kab. Toba	Persentase Pertambahan Ormas	**%**	**20**	**652.948.781**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Kab. Toba	Persentase Pertambahan Ormas	**%**	**20**	**652.948.781**
IV.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Kab. Toba	Persentase Ormas dan LSM yang ber SKT dan aktif	**%**	**100**	**652.948.781**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Kab. Toba	Persentase Ormas dan LSM yang ber SKT dan aktif	**%**	**100**	**652.948.781**
01	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Toba	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	250	652.948.780,70	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Toba	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	250	652.948.780,70
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Kab. Toba	Persentase Penurunan jumlah kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika	**%**	**5**	**143.127.377**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Kab. Toba	Persentase Penurunan jumlah kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika	**%**	**5**	**143.127.377**
V.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Kab. Toba	Jumlah tersosialisasinya P4GN	**Kegiatan**	**3**	**143.127.377**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Kab. Toba	Jumlah tersosialisasinya P4GN	**Kegiatan**	**3**	**143.127.377**
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di	Orang	100	143.127.377,16	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Orang	100	143.127.377,16

	Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
VI	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Kab. Toba**	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	**%**	**100**	**345.856.590**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Kab. Toba**	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	**%**	**100**	**345.856.590**
VI.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Kab. Toba	Jumlah Laporan Konflik Sosial	**Laporan**	**12**	**345.856.590**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Kab. Toba	Jumlah Laporan Konflik Sosial	**Laporan**	**12**	**345.856.590**
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	200	159.259.272,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	150	159.259.272,00
04	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	186.597.318,00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	186.597.318,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba. Namun, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat (*NIHIL*) terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba. Usulan Program dan Kegiatan para pemangku kepentingan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.5.1 berikut:

Tabel 2.5.1

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Toba

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pa...	...an
(1)					

NIHIL

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TOBA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba adalah Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Adapun isu – isu strategis nasional terkait Urusan Pemerintahan Umum sebagai berikut :

a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
c. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
d. Integritas Partai Politik
e. Peningkatan kualitas demokrasi
f. Pembinaan kerukunan antarsuku dan Intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional
g. Penanganan konflik sosial
h. Stabilitas ekonomi, kerukunan sosial dan penguatan seni budaya Indonesia dalam mendukung ketahanan nasional.
i. Fasilitasi dan sinergitas Penanganan Penyakit Masyarakat (narkoba, judi online, lgbt, pornografi, dan prostitusi)

j. Peningkatan peran Ormas melalui penguatan kelembagaan, pengawasan,dan pemberdayaan
k. Penguatan peran pemerintah dalam pengawasan, pemberdayaan ormas serta digitalisasi pendaftaran dan pemanfaatan data ormas
l. Peningkatan kewaspadaan nasional dan daerah
m. Penguatan stabilitas sosial, politik dan keamanan di wilayah Papua dan IKN
n. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan Forkopimda
o. Penguatan FKUB, FPK, FKDM, dan PPWK dalam meningkatkan kewaspadaan nasional

Dalam perkembangannya, Direktorat Jenderal Politik Dalam Negeri dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa diantaranya dengan pembentukan forum – forum strategis yaitu :

a. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006;
b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006; dan
c. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah

Kebijakan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba didasarkan kepada visi dan misi Kabupaten Toba, yang telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan (2025-2029) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi adalah: **“TOBA MANTAP 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”**

Dan misi adalah;

a. Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak;
b. Membangun infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas dan merata;
c. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah;
d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai pelayan (parhobas) rakyat;
e. Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
f. Melestarikan nilai budaya dan kearifan local

3.2. Tujuan, Sasaran, dan Program beserta Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba

3.2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada isu-isu dan analisis strategis. Adapun tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba beserta indikator dan target kinerja berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1.a sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.a Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sumber Data	Satuan	Target Kinerja				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan masyarakat yang memahami politik	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba	Persem	51.71	57.77	-	-	-
		Pemahaman Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba	Persem	-	-	7	10	13

Sehubungan dengan adanya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba beserta indikator dan target kinerja mengalami perubahan dikarenakan menyesuaikan dengaan visi dan misi Kepala Daerah. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba beserta indikator dan target kinerja berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1.b sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.b Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang Harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	Kemendagri	Persen(%)	N/A	N/A	6.30	6.40	6.50	6.60	6.70

3.2.2. Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Adapun sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba beserta indikator dan target kinerja berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.2.2.a sebagai berikut :

Tabel 3.2.2.a Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Sumber Data	Satuan	Target Kinerja				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan serta Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba	Persem	79.17	79.17	81.38	81.38	81.38
2.	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Angka Kriminalitas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba	Persem	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26

Sehubungan dengan adanya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba beserta indikator dan target kinerja mengalami perubahan dikarenakan menyesuaikan dengaan visi dan misi Kepala Daerah. Adapun Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba beserta indikator dan target kinerja berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 3.2.2.b sebagai berikut :

Tabel 3.2.2.b Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Sumber Data	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang Harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	Kemendagri	Persen (%)	N/A	N/A	6.30	6.40	6.50	6.60	6.70
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Bappelitbangda Kabupaten Toba	Persen (%)	69.75	74.00	75.90	77.40	78.60	79.70	81.00

3.2.3. **Program dan Indikator Program Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tob**a

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra, program perangkat daerah mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya. Rumusan kebijakan yang tepetakan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Toba dalam 5 (lima) tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada penguatan peran Badan Kesbangpol Kabupaten Toba.

Adapun Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba beserta indikator dan target kinerja berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.2.3.a sebagai berikut :

Tabel 3.2.3.a Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026

No.	Pogram	Indikator Program	Satuan	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan Kebangsaan	Persen (%)	24.25	36.37	48.50	60.62	72.75
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per 10.000 Penduduk	Persen (%)	12.12	12.12	24.25	24.25	36.37
3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pertambahan Ormas	Persen (%)	20	20	20	20	20

4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Penurunan jumlah kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika	Persen (%)	5	5	5	5	5
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian Konflik Sosial	Persen (%)	100	100	100	100	100
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen (%)	100	100	100	100	100

Sehubungan dengan adanya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba beserta indikator dan target kinerja mengalami perubahan dikarenakan menyesuaikan dengaan visi dan misi Kepala Daerah. Adapun Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba beserta indikator dan target kinerja berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 3.2.3.b sebagai berikut :

Tabel 3.2.3.b Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba P berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029

No.	Pogram	Indikator Program	Baseline 2024	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang menerima Penguatan nilai-nilai Ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan	6.60	9.19	11.68	14.06	16.35	18.54	20.64
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	53.09	53.09	53.16	53.23	53.29	53.36	53.43
3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	73.85	75.71	77.33	78.75	80.00	81.11	82.11
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	100	100	100	100	100	100	100

		Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan							
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100	100	100	100	100	100	100
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Internal AKIP	69.75	74.00	75.90	77.40	78.60	79.70	81.00

3.3. **Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025**

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba 2025-2029. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai dokumen untuk penyusunan rencana kerja pembangunan yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Berbagai bentuk kinerja yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendukung perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toba 2025 – 2029 yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba ini merupakan dokumen untuk mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Toba Tahun 2025. Untuk mencapai sasaran dan target dari program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan Rencana Kerja ini dibutuhkan dana/anggaran sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik dan lancar. Program/Kegiatan yang tertuang pada Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba Tahun 2025.

Perubahan Rencana kerja yang disusun untuk Tahun Anggaran 2025 ini terdiri dari 6 (enam) program dengan 10 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah di Kabupaten Toba, mencakup seluruh kecamatan, dan seluruh kelurahan/desa. Kebutuhan pagu indikatif yang direalisasikan sebesar Rp. 5.387.294.271(lima milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 diusulkan pendanaannya dari dana APBD seperti dana transfer umum-dana alokasi umum, dan sumber pendanaan lainnya yang dianggap sah. Untuk lebih rinci Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 sesuai yang telah direncanakan dan hasil analisis kebutuhan serta telah di input kedalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dapat dilihat pada Tabel 3.3.1 berikut ini:

Tabel 3.3.1

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja satuan Perangkat Daerah

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TOBA

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							5.946.016.000,00	5.786.330.293,00	5.387.294.271,00							9.472.000.000,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							5.946.016.000,00	5.786.330.293,00	5.387.294.271,00							9.472.000.000,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							5.946.016.000,00	5.786.330.293,00	5.387.294.271,00							9.472.000.000,00	
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah				100 Persen	100 Persen	3.092.593.000,00	3.048.907.696,00	2.918.217.928,45							3.452.000.000,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah undefined	-			100 Persen undefined undefined	100 Persen undefined undefined	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesbangpol Toba		170.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	45.000.000,00	28.787.702,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	35.000.000,00	30.000.000,00	24.043.401,60	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	-			100 Persen	100 Persen	2.371.093.000,00	2.638.599.680,00	2.638.599.680,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesbangpol Toba		2.280.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/ bulan	20 Orang/ bulan	2.371.093.000,00	2.638.599.680,00	2.638.599.680,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			2.280.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	-			100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesbangpol Toba		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	-			100 Persen	100 Persen	375.000.000,00	245.788.016,00	245.788.016,00			-	4. Peningkatan tata kelola	Kesbangpol Toba		495.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGS

							Cakupan Layanan Administrasi Umum												pemerintahan dan pelayanan publik				A DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	1.283.160,00	1.283.160,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	40.000.000,00	21.376.602,00	15.969.903,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	2.184.480,00	2.184.480,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	10.115.774,00	7.485.601,85	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	280.000.000,00	205.588.000,00	105.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	0,00	0,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesbangpol Toba		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	-			100 Persen	100 Persen	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesbangpol Toba		82.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	100 Persen	124.000.000,00	57.020.000,00	57.020.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesbangpol Toba		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	59.000.000,00	55.600.000,00	55.600.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

							dan dibayarkan Pajaknya												pelayanan publik				
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	2 Unit	15.000.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan				60,62 Persen	60,62 Persen	687.000.000,00	742.383.602,00	688.589.124,89							1.715.000.000,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-			10 Kegiatan	10 Kegiatan	687.000.000,00	742.383.602,00	742.383.602,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Toba		1.715.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		

							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				250 Orang	250 Orang	125.000.000,00	435.342.842,00	404.613.517,13	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			125.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				5450 Orang	5450 Orang	132.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			575.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				100 Keluarga	100 Keluarga	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka																	
							Jumlah Paskibraka				40 Orang	40 Orang	200.000.000,00	307.040.760,00	283.975.607,76	Semua Kota/Kab, Semua Kecam	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerint			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN

																atan, Semua Kel/Desa			ahan dan pelayanan publik				POLITIK
	8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																	
							Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per 10.000 penduduk.				24,25 Persen	24,25 Persen	1.076.423.000,00	683.195.897,00	638.554.469,80							1.950.000.000,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Jumlah Pemantauan dan Perkembangan Situasi Politik	-			12 Laporan	12 Laporan	1.076.423.000,00	683.195.897,00	683.195.897,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Toba		1.950.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

						Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																			
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				400 Orang	400 Orang	886.423.000,00	683.195.897,00	638.554.469,80	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			1.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		

							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	100 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka																	

							Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pertambahan Ormas				20 Persen	20 Persen	420.000.000,00	704.226.700,00	652.948.780,70								940.000.000,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang ber SKT dan Aktif	-			100 Persen	100 Persen	420.000.000,00	704.226.700,00	704.226.700,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Toba		940.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				250 Orang	250 Orang	300.000.000,00	704.226.700,00	652.948.780,70	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		

							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			190.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penurunan jumlah kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika				5 Persen	5 Persen	160.000.000,00	245.699.808,00	143.127.377,16							365.000.000,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Jumlah Tersosialisasinya P4GN	-			3 Kegiatan	3 Kegiatan	160.000.000,00	245.699.808,00	245.699.808,00			-	4. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kabup		365.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGS

						Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya													pemerintahan dan pelayanan publik	aten Toba			A DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	200 Orang	70.000.000,00	245.699.808,00	143.127.377,16	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	

							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANA	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial				100 Persen	100 Persen	510.000.000,00	361.916.590,00	345.856.590,00								1.050.000.000,00	

						N KONFLIK SOSIAL																
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Konflik Sosial	-			12 Laporan	12 Laporan	510.000.000,00	361.916.590,00	361.916.590,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Toba		1.050.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	

							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				200 Orang	50 Orang	150.000.000,00	175.319.272,00	159.259.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				200 Orang	200 Orang	180.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	186.597.318,00	186.597.318,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
											JUMLAH		**5.946.016.000,00**	**5.786.330.293,00**	**5.387.294.271,00**							**9.472.000.000,00**	

Rencana Strategis (Renstra) merupakan acuan dalam penyusunan rencana tahunan (Renja) Organisasi Perangkat Daerah. Pada Renstra telah disusun kebutuhan pagu program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

Perbandingan Pagu Rencana Strategis tahun 2025 dengan pagu program rancangan akhir perubahan rencana kerja tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3.2 berikut ini:

Tabel 3.3.2

Perbandingan Pagu Renstra 2025 dengan Pagu Rancangan Akhir P-Renja 2025

Program		Pagu Renstra 2025 (Rp.)	Pagu P.Renja 2025 (Rp.)	Persentase (%)	Lebih/ Kurang (Rp.)	Persentase (%)			Realisasi DPA	% Renstra RP	% Renja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	2.944.682.880	2.918.217.928	99,10	(26.464.952)	(1)			2.918.217.928	99,10	100,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	60,62	650.000.000	688.589.125	105,94	38.589.125	6			688.589.125	105,94	100,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	24,25	1.020.500.000	638.554.470	62,57	(381.945.530)	(37)			638.554.470	62,57	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	20	320.000.000	652.948.781	204,05	332.948.781	104			652.948.781	204,05	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	5	270.000.000	143.127.377	53,01	(126.872.623)	(47)			143.127.377	53,01	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100	700.000.000	345.856.590	49,41	(354.143.410)	(51)			345.856.590	49,41	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	2.944.682.880	2.918.217.928	99,10	(26.464.952)	(1)			2.918.217.928	99,10	100,00

Tabel 3.3.3
RENCANA KERJA DARI SIPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TOBA
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							5.946.016.000,00	5.786.330.293,00	5.387.294.271,00							9.472.000.000,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							5.946.016.000,00	5.786.330.293,00	5.387.294.271,00							9.472.000.000,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							5.946.016.000,00	5.786.330.293,00	5.387.294.271,00							9.472.000.000,00	
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah				100 Persen	100 Persen	3.092.593.000,00	3.048.907.696,00	2.918.217.928,45							3.452.000.000,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah undefined -				100 Persen undefined undefined	100 Persen undefined undefined	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesbangpol Toba		170.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	45.000.000,00	28.787.702,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	35.000.000,00	30.000.000,00	24.043.401,60	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan Cakupan Layanan Administrasi Keuangan -	100 Persen	100 Persen	2.371.093.000,00	2.638.599.680,00	2.638.599.680,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesbangpol Toba		2.280.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.371.093.000,00	2.638.599.680,00	2.638.599.680,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			2.280.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian -	100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesbangpol Toba		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum Cakupan Layanan Administrasi Umum -	100 Persen	100 Persen	375.000.000,00	245.788.016,00	245.788.016,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan	Kesbangpol Toba		495.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

																pelayanan publik				
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	1.283.160,00	1.283.160,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	40.000.000,00	21.376.602,00	15.969.903,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	2.184.480,00	2.184.480,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	10.115.774,00	7.485.601,85	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	280.000.000,00	205.588.000,00	105.104.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah -	100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	0,00	0,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesbangpol Toba		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Kinerja Aparatur -	100 Persen	100 Persen	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan	Kesbangpol Toba		82.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA

																pelayanan publik				DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah -	100 Persen	100 Persen	124.000.000,00	57.020.000,00	57.020.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesbangpol Toba		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	59.000.000,00	55.600.000,00	55.600.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	2 Unit	15.000.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	60,62 Persen	60,62 Persen	687.000.000,00	742.383.602,00	688.589.124,89							1.715.000.000,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan -	10 Kegiatan	10 Kegiatan	687.000.000,00	742.383.602,00	742.383.602,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Toba		1.715.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang	250 Orang	125.000.000,00	435.342.842,00	404.613.517,13	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			125.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5450 Orang	5450 Orang	132.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan			575.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA

													Semua Kel/Desa			pelayanan publik				DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga	100 Keluarga	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka														
							Jumlah Paskibraka	40 Orang	40 Orang	200.000.000,00	307.040.760,00	283.975.607,76	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
							Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI	Rasio masyarakat yang mendapat pendidikan politik per 10.000 penduduk.	24,25 Persen	24,25 Persen	1.076.423.000,00	683.195.897,00	638.554.469,80							1.950.000.000,00	

						PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pemantauan dan Perkembangan Situasi Politik -	12 Laporan	12 Laporan	1.076.423.000,00	683.195.897,00	683.195.897,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Toba		1.950.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 Orang	400 Orang	886.423.000,00	683.195.897,00	638.554.469,80	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			1.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	100 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka													
							Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pertambahan Ormas	20 Persen	20 Persen	420.000.000,00	704.226.700,00	652.948.780,70							940.000.000,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang ber SKT dan Aktif -	100 Persen	100 Persen	420.000.000,00	704.226.700,00	704.226.700,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Toba		940.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250 Orang	250 Orang	300.000.000,00	704.226.700,00	652.948.780,70	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			190.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penurunan jumlah kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika	5 Persen	5 Persen	160.000.000,00	245.699.808,00	143.127.377,16							365.000.000,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Tersosialisasinya P4GN -	3 Kegiatan	3 Kegiatan	160.000.000,00	245.699.808,00	245.699.808,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Toba		365.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	200 Orang	70.000.000,00	245.699.808,00	143.127.377,16	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	100 Persen	100 Persen	510.000.000,00	361.916.590,00	345.856.590,00							1.050.000.000,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Konflik Sosial -	12 Laporan	12 Laporan	510.000.000,00	361.916.590,00	361.916.590,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Toba		1.050.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	50 Orang	150.000.000,00	175.319.272,00	159.259.272,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	200 Orang	180.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	186.597.318,00	186.597.318,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecam	Pendapatan Bagi Hasil	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA

													atan, Semua Kel/Desa			pelayanan publik					DAN POLITIK
	JUMLAH									**5.946.016.000,00**	**5.786.330.293,00**	**5.387.294.271,00**							**9.472.000.000,00**		

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025 merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2025-2029. Yang memuat antara lain evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari pelaksanaan RENJA ini akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja. Dengan demikian, output Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba adalah Program Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba menjadi sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba ini disusun sebagai acuan dari Pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba untuk Tahun 2025 dan sebagai salah satu pedoman pengambilan keputusan secara tepat dalam penyusunan dan penyelenggaraan program yang direncanakan pada tahun berikutnya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini dibuat, semoga bermanfaat khususnya bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba dan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba pada umumnya dalam proses formulasi, implementasi dan monitoring serta evaluasi sistem perencanaan yang prospektif, realistis dan akuntabel menuju “Toba Mantab 2029 Maju daerahnya, sejahtera rakyatnya dan berkelanjutan pembangunannya”. Oleh karena itu dokumen Perubahan Rencana Kerja ini hendaknya menjadi daya picu meningkatkan kinerja dan perencanaan yang lebih baik Tahun 2025

BALIGE, 2025

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TOBA

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

FREDDY ADVENT PANJAITAN,S.Sos.MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19781203 200502 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
INSPEKTORAT
Jln. Huta Bulu – Mejan, Balige, Sumatera Utara 22312
Telp. (0632) 21393, Faksimile (0632) 21393
Laman www.tobakab.go.id, Pos-el Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian@tobakab.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (P RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025

Uraian Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir P Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba Tahun 2025
Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Toba Nomor 700/218/IRDA/ST/2024 tanggal 16 Juli 2025 untuk melaksanakan reviu Perubahan Renja PD Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

Kesimpulan:
1. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir P Renja PD
a. Dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu rancangan akhir P Renja PD telah lengkap.
2. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir P Renja PD dangan Rancangan Akhir P RKPD
a. Nama program, kegiatan, pagu dana dan indikator pada rancangan akhir P Renja PD telah sesuai dengan nama program, kegiatan, pendanaan dan indikator pada P RKPD.
Catatan reviu:
--
Koreksi/ Perbaikan yang belum/tidak disetujui
--
Rekomendasi :
Mempertahankan keselarasan nama program, kegiatan, pagu dana dan indikator pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan P RKPD Kabupaten Toba Tahun 2025

Balige, 24 Juli 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KabupatenToba	Plt. Inspektur KabupatenToba
Freddy Advent Panjitan,S.Sos.MM	**Bobby N. Batubara, SE, M.Si, Ak, CGCAE**
Pembina Tk. I	**Pembina Tk. I**
NIP. 19781203 200502 1 003	**NIP. 19740405 200604 1 004**